

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Berfikir adalah perbedaan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Perbedaan pendapat merupakan bentuk ekspresi dari cara berfikir setiap manusia. Dalam agama Islam, persoalan berpendapat juga sangat dianjurkan. Islam selalu menganjurkan untuk berfikir sebelum berbicara. Nabi Muhammad yang menjadi salah satu tokoh dalam agama Islam pernah menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan apa yang difikirkannya. Tetapi, Nabi Muhammad menjelaskan kepada seluruh umatnya untuk mengatakan hal yang baik, apabila seorang manusia hanya mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka lebih baik diam.

“Hai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan – amalan dan mengampuni dosa – dosamu. Barangsiapa menaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (Al-Ahzab : 70-71)

Dewasa ini, banyak sekali pendapat yang tersebar di berbagai macam media masa yang ditulis oleh orang – orang yang bergerak di bidang jurnalistik. Hal ini terjadi dikarenakan kehidupan manusia modern sulit untuk dipisahkan dari berbagai macam bentuk media massa. Media massa yang tersebar di masyarakat memiliki beragam bentuk, mulai dari surat kabar, buku, televisi, radio, maupun majalah. Masyarakat memiliki perbedaan pandangan untuk mengartikan media dan fungsinya juga beragam.

Pada buku yang ditulis oleh Werner J. Servin, terdapat dua pakar yaitu Harold Lasswell dan Charles Wright yang menjelaskan fungsi dari media. Lasswell mengatakan bahwa terdapat 3 fungsi, yang pertama adalah pengamatan lingkungan, korelasi bagian yang terdapat pada masyarakat untuk merespon lingkungan, dan yang terakhir adalah memberikan warisan yang ada di masyarakat untuk setiap generasi. Sementara itu Wright mengatakan bahwa media massa juga berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat (Werner dkk., 2011: 386).

Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa sudah menjadi hal yang wajar apa bila manusia ingin bersuara, menyampaikan pendapat berdialog, dan bertukar pikiran satu sama lain. Untuk itu, media massa juga menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi, peran media massa atau pers juga tidak pernah lepas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Bermula ketika kolonial Belanda datang ke tanah air untuk melakukan invasi perdagangan, melalui *Vereenigde Oost-Indische Companegnie* bisa juga disebut dengan VOC yang merupakan kongsi dagang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah di tanah Nusantara. Pemerintah VOC pada waktu itu melarang terbitnya surat kabar pada tahun 1712 di daerah Batavia yang sekarang disebut Jakarta dengan alasan bahwa pemerintah kolonial takut apabila pesaingnya memperoleh informasi perdagangan melalui surat kabar yang tersebar. Keadaan ini terus berlanjut hingga abad ke-19. Pemerintah Hindia Belanda terus melakukan intervensi kepada media yang ada. Proses pengadilan adalah hal lumrah yang dilakukan para penguasa saat itu untuk menekan media massa yang ada. Tindakan seperti ini sering kali ditengarai oleh masalah pribadi penguasa tersebut. Bentuk kekejaman pemerintah kepada pers

sampai digambarkan dengan ungkapkan dengan kalimat “seorang redaktur di daerah jajahan ini selalu bekerja dengan satu kakinya di penjara” (Ibnu, 2004: 59-60).

Penguasa memang kerap menggunakan pers sebagai alat politik selama rezimnya berkuasa. Namun, ada juga pihak yang menggunakan media massa sebagai alat untuk melawan para penguasa. Kaum terpelajar dari kaum pribumi menggunakan pers sebagai alat politik untuk melawan kolonial pada tahun 1900-an. Nama – nama media massa yang digunakan pada saat itu menunjukkan semangat yang berapi – api untuk memperoleh kemerdekaan, contohnya *Benih Kemerdekaan*, *Kemadjuan Indonesia*, *Suara Berjuang*, dan *Suara Kemerdekaan*. Melalui media tersebut, mereka menuangkan gagasan dan ide – ide politik yang dapat dibaca oleh orang lain dan mampu menularkan virus perlawanan terhadap rezim yang ada.

Memasuki era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, peran media kembali seperti awal kekuasaan Belanda di Nusantara. Pemerintah mengeluarkan Undang - undang No. 11/66 jo UU No. 4/1967 yang menimbulkan permasalahan untuk menerbitkan berita. Media massa harus memiliki dua surat izin berupa Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtib yang merupakan kekuatan pada masa Soeharto. Dengan dua surat izin tersebut, pemerintah bisa dengan mudah mengawasi pers. Upaya itu juga berhasil untuk memberikan stabilitas politik pada masa itu (Ibnu, 2004: 63).

Pada zaman yang sama, tepatnya pada tahun 1982, posisi pers juga mulai berubah sejak munculnya UU Pokok Pers No. 21/1982 bahwa pers tidak hanya berurusan dengan politik dan kekuasaan belaka, akan tetapi media massa juga mulai merambah ke dunia bisnis. Peran bisnis pers dengan bisnis semakin harmonis ketika Menteri Penerangan

mengeluarkan peraturan No. 01/Per/Menpen/1984 yang mengatur cara untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau bisa disebut dengan SIUPP (Ibnu, 2004: 64). Peraturan ini lah yang menyebabkan munculnya perusahaan – perusahaan dengan modal besar mulai bermunculan. Didorong oleh dana yang melimpah, perusahaan mapan dengan mudah untuk mendapatkan izin dari Menteri Penerangan dan membuat perusahaan media dengan modal kecil menjadi gulung tikar.karena kehabisan modal. Mulai saat itu pers hanya menjadi industri bisnis pada umumnya yang mulai menanggalkan idealisme.

Ketika zaman Orde Lama, merupakan hal yang lumrah apabila pers digunakan sebagai alat politik dari beberapa kelompok politik. Masyumi menggunakan Abadi sebagai alat politik, sedangkan NU memakai Duta Masyarakat sebagai perpanjangan tangan organisasi dan juga Koran Suluh Marhaen yang menjadi simbol partai yang dominan saat itu, yaitu PNI. Fenomena seperti ini sempat redup ketika memasuki zaman Orba, hanya Partai Golongan Karya saja yang dapat menyuarakan pemikiran dengan bebas melalui media yang digunakannya, Harian Suara Rakyat. Sedangkan partai lain seperti PPP dan PDI tidak memiliki alat politik pers seperti Gokar yang menjadi partai pemerintah.

Semenjak runtuhnya rezim Orba, fenomena penggunaan media massa sebagai alat politik kembali marak dilakukan oleh berbagai partai politik. Seperti Demokrat yang berhubungan dengan PDI, sedangkan PAN mempunyai media sendiri yang bernama Amanat,terdapat juga Duta Masyarakat yang dulunya menjadi corong dari NU, kini berafiliasi dengan PKB notabene merupakan partai yang berasal dari kader – kader NU. selain terdapat media yang berafiliasi dengan partai politik, terdapat juga tokoh – tokoh

penting yang mempunyai media massa dan juga menjadi figure penting yang ada di partai politik. salah satu konglomerat Indonesia yaitu Aburizal Bakrie memiliki stasiun televisi swasta yang mengudara secara nasional, ANTV. Pada saat yang bersamaan pula, taipan yang berasal dari Bakrie Grup juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pemberitaan yang berhubungan dengan Golkar atau Aburizal Bakrie sangatlah banyak, dan semakin signifikan ketika mendekati Pemilu 2014. Kejadian yang sama juga terjadi pada MetroTV yang dimiliki oleh Surya Paloh saat bergabung dengan Golkar, pemberitaan mengenai partai berlambang beringin meningkat drastis. Tetapi, ketika Surya Paloh hengkang dari Golkar dan membentuk Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), pemberitaan Golkar menurun drastis dan Nasdem semakin menanjak (Fajar, 2013: 40-41).

Hal seperti ini pernah terjadi pada Pilpres 2014 silam, MetroTV yang dipegang oleh Surya Paloh menjadi kubu yang mendukung pasangan Jokowi – JK, sedangkan TVONE menjadi stasiun tv yang rajin meberitakan kubu Prabowo – Hatta. Perbandingannya pun cukup signifikan, dilansir dari Remotivi, perbedaan dalam pemberitaan kedua pasang calon sangat timpang di stasiun tv tersebut, yaitu sebanyak 74,4% berita soal Jokowi dan Prabowo hanya mendapatkan jatah berita sebanyak 12% saja. Berita dengan nada positif untuk Jokowi pun lebih sering dilakukan oleh MetroTV, sedangkan untuk TVONE lebih sering memberikan berita bernada positif untuk Prabowo. Keberpihakan yang sangat terlihat ini membuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan teguran yang ditujukan untuk TVONE dan MetroTV. Dilansir dari Merdeka.com, KPI telah menuturkan dalam siaran pers pada tanggal 10 Juni 2014 yang mereka tujukan untuk

TVONE dan MetroTV yang dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap tayangan berita Pilpres 2014.

Tindakan yang dilakukan oleh MetroTV dan TVONE sudah menjadi hal yang lumrah dalam dunia jurnalistik. Wartawan akan mengkonstruksi suatu peristiwa menjadi berita yang sesuai dengan pemikiran para wartawan yang menulis berita. Walau sudah kerap terjadi, tindakan yang dilakukan oleh stasiun tv tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik Pasal 1 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 berbunyi "*Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk*". Pasal tersebut memiliki makna seorang jurnalis harus memberitakan suatu peristiwa dengan jujur menurut suara hati dan keadaan yang sebenarnya tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain, bahkan pemilik perusahaan media itu.

Menjelang Pemilu yang akan diadakan pada tahun 2019 mendatang, hubungan antara tokoh politik dari partai tertentu dengan pemilik media menjadi cukup baik. Selain itu, terdapat juga pendatang baru yang turun dalam kancah perpolitikan saat ini dengan bekal banyak sekali perusahaannya di bidang media, yaitu Hary Tanoesoedibjo yang menjadi bos dari MNC Grup dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Dibawah kuasanya, Hary Tanoe memiliki media massa yang beragam, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, Inews yang menjadi raksasa stasiun tv di tanah air.

Pemilu 2019 telah memiliki 2 pasang calon yang akan bertarung untuk memperoleh suara dari jutaan rakyat Indonesia. Jokowi – Ma'ruf menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, sementara pada nomor urut 2 terdapat pasangan

Prabowo – Sandiaga. Terjadi hal yang menarik ketika mendekati waktu pendaftaran calon presiden untuk Pemilu 2019. Terdapat sekelompok Ulama yang bernama Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Ulama (GNPF Ulama). Kelompok tersebut melakukan pertemuan guna memilih salah satu nama yang akan direkomendasikan untuk maju pada Pilpres 2019. Setelah melakukan dua kali pertemuan, yaitu pada tanggal 27 Juli 2018 dan 16 September 2018. Kedua agenda tersebut bernama Ijtima' Ulama jilid I dan Ijtima' Ulama Jilid II.

Sejak akan diadakannya Ijtima' Ulama, banyak pihak yang menilai bahwa acara tersebut sarat akan kepentingan politik dari kubu Prabowo. Bagaimana tidak, setelah dua kali melakukan pertemuan, GNPF Ulama sepakat untuk mendukung pasangan dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Sedangkan, dari pihak yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin merasa hasil dari Ijtima' Ulama Jilid I dan Jilid II sudah ditunggangi kepentingan dari kubu kompetitor.

Media massa yang memberitakan kejadian ini pun punya berbagai sudut pandang dalam menyajikan beritanya. Terdapat media yang membingkai berita tersebut dengan nada positif atau pun negatif. Menjadi hal yang menarik ketika Erik Thohir sebagai bos dari Mahaka Group yang membawahi Koran Republika menjadi Ketua Tim Pemenagan pasangan Jokowi – Ma'ruf. Koran Republika dikenal sebagai surat kabar yang tidak memihak terhadap pemerintah, dan selalu menampilkan berita – berita yang netral. Penetapan bos Mahaka Group sebagai ketua Tim Pemenagan Jokowi Ma'ruf terjadi di antara dua agenda Ijtima' Ulma yang dilakukan oleh GNPF Ulama, tepatnya pada tanggal 7 September 2018.

Peneliti tertarik untuk melihat perbedaan framing yang dilakukan oleh Koran Republika terhadap pemberitaan GNPF Ulama yang melakukan dua agenda Ijtima' Ulama, mengingat hasil putusan dari agenda tersebut yang mendukung pasangan Prabowo – Sandiaga. Peneliti juga tertarik kepada kejadian ini dikarenakan kondisi politik semakin memanas mendekati waktu pemilihan presiden. Selain itu, banyak sekali tokoh politik yang disorot dan diberitakan oleh media massa yang mendukung pasangan calon presiden.

Alasan penulis untuk melakukan perbandingan terhadap penulisan berita Koran Republika mengenai Ijtima' Ulama Jilid I dan Jilid II yang dilakukan oleh GNPF Ulama ialah mengetahui perbedaan pemberitaan yang dilakukan oleh Koran Republika. Mengingat GNPF Ulama telah menyatakan dukungan terhadap kompetitornya, yaitu pasangan Prabowo – Sandiaga. Berita pada Koran Republika yang akan penulis teliti adalah koran yang keluar pada bulan Juli sampai Oktober tahun 2018 yang berkaitan dengan Ijtima' Ulama Jilid I dan II. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis framing model Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Alasan menggunakan model kedua pakar itu karena berasumsi bahwasannya setiap berita memiliki frame yang fungsinya menjadi pusat dari organisasi ide. Frame ini ialah sebuah ide yang berasal berbagai elemen seperti kutipan sumber, pemakaian kata atau kalimat tertentu, dan latar informasi yang digabungkan dalam teks berita.



## **2. Pokok dan Rumusan Masalah**

### **2.1. Pokok Masalah**

Penelitian ini akan berfokus tentang terhadap perbedaan penulisan berita Ijtima' Jilid I dan II Ulama yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2018 dan 16 September 2018 di Koran Republika periode bulan Juli sampai Oktober 2018.

### **2.2. Rumusan Masalah**

Adakah perbedaan framing Koran Republika sebelum dan sesudah penetapan Erik Thohir sebagai tim sukses Jokowi – Ma'ruf pada Pilpres 2019 terhadap perbedaan kepenulisan berita mengenai Ijtima' Ulama Jilid I dan II yang dilakukan oleh GNPF di koran Republika periode Juli sampai Oktober 2018.

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **3.1. Tujuan Penelitian**

Mengetahui perbedaan framing Koran Republika sebelum dan sesudah penetapan Erik Thohir sebagai tim sukses Jokowi – Ma'ruf pada Pilpres 2019 terhadap perbedaan kepenulisan berita mengenai Ijtima' Ulama Jilid I dan II yang dilakukan oleh GNPF di koran Republika periode Juli sampai Oktober 2018.

### **3.2. Manfaat Penelitian**

#### **3.2.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritik penelitian ini dapat dijadikan bermanfaat dalam mengembangkan teori analisis framing terhadap media massa

### **3.2.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga jurnalis dalam menyajikan berita yang mengandung muatan politik.